

JURNAL
UPAYA REUNIFIKASI KOREA
(STUDI TENTANG PEMERINTAHAN PRESIDEN KIM DAE JUNG
DI KOREA SELATAN TAHUN 1998-2003)¹
THE EFFORT OF REUNIFICATION KOREA
(A STUDY OF PRESIDENT KIM DAE JUNG GOVERNMENT
IN SOUTH KOREA IN 1998-2003)¹

Oleh :

Dessy Fathimatuzzahrah²

Leo Agung S.³

Abstract

Republic of Korea, known as South Korea is a country in East Asian which is located in south of Korea Peninsula. Republic of Korea borders on North Korea in north. Both united until 1948. It borders on Japan Ocean in the east, East Cina Ocean in the south, and Yellow Ocean in the west.

In August 22th 1910, Japan occupied Korea based on Aneksasi Agreement. The crisis of the World War II porced Japan looked for the help from founding father of Korea. So that, Japan could occupy the Korea territory more Korea asked Japan to allow it to prepare the independence. The preparation was well done. So, in August 15th 1945 Korea was independent. The liberalism and communism divided Korea in 38^o of north latitude. The interferences of both countries divided Korea. In 1950 until 1953, Korea War broken the relationship.

Based on the background about the research problems of the study are identified as follows: (1) How politics carrier a President Kim Dae Jung ?; (2) How the background of reunification Korea in 1998 ?; (3) How President Kim Dae Jung's policy to reunificated Korea in 1998-2003 ?

The aims of the research are to identify: (1) Politics carrier a President Kim Dae Jung; (2) The background of reunification Korea in 1998; (3) President Kim Dae Jung's policy to reunificated Korea in 1998-2003.

Key words: reunification, South Korea, Sunshine Policy

Keterangan:

¹ Rangkuman penelitian skripsi.

² Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret.

³ Dosen dan Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS, Surakarta.

Kajian Teori

1. Peran Politik

Peran politik adalah fungsi seseorang dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan dari sistem politik. Proses menentukan dan melaksanakan tujuan menyangkut perilaku penting yang dilakukan bagi kepentingan orang banyak, konsep pemikiran yang dicetuskan dalam sebuah sistem, dan selalu terkait dengan perebutan kekuasaan. Setidaknya melalui ketiga hal itu peran politik dapat terjadi. Dengan demikian, jika seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang telah menjalankan suatu peran sosial (Setiadi & Kolip, 2011).

Peran politik menyangkut aktivitas dalam kegiatan berpolitik. Aktivitas berpolitik merupakan keterlibatan atau partisipasi individu dalam kegiatan politik. Pembacaan dari partisipasi individu dalam kegiatan berpolitik akan memperlihatkan perannya pada suatu sistem politik.

2. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang, namun wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.

Pada umumnya, pemerintah demokratis liberal mengizinkan lebih banyak inisiatif dan perusahaan swasta dalam bidang ekonomi, sosial dan kultural daripada pemerintah sosialis, terutama pemerintah komunis. Ruang lingkup eksternal kekuasaan juga meningkat. Hubungan pengendalian yang sederhana, seperti penguasaan tingkah laku negara lain yang lebih lemah melalui penarikan upeti, pengiriman armada laut atau pemaksaan kepatuhan simbolis, telah diganti dengan sistem dependensi dan interdependensi yang kompleks dan multifungsional. Suatu negara bisa mengendalikan kekuasaan negara lain tanpa mengirim pasukan militer. Ruang lingkup eksternal sudah meluas ke berbagai jenis kegiatan, sehingga suatu negara mengendalikan kekuasaan negara lain melalui penguasaan dalam bidang seperti teknologi yang vital, sumber energi seperti uranium, modal untuk investasi,

tenaga ahli manajemen, tenaga buruh murah dan peralatan militer (Jones Walter, 1993).

3. Kebijakan

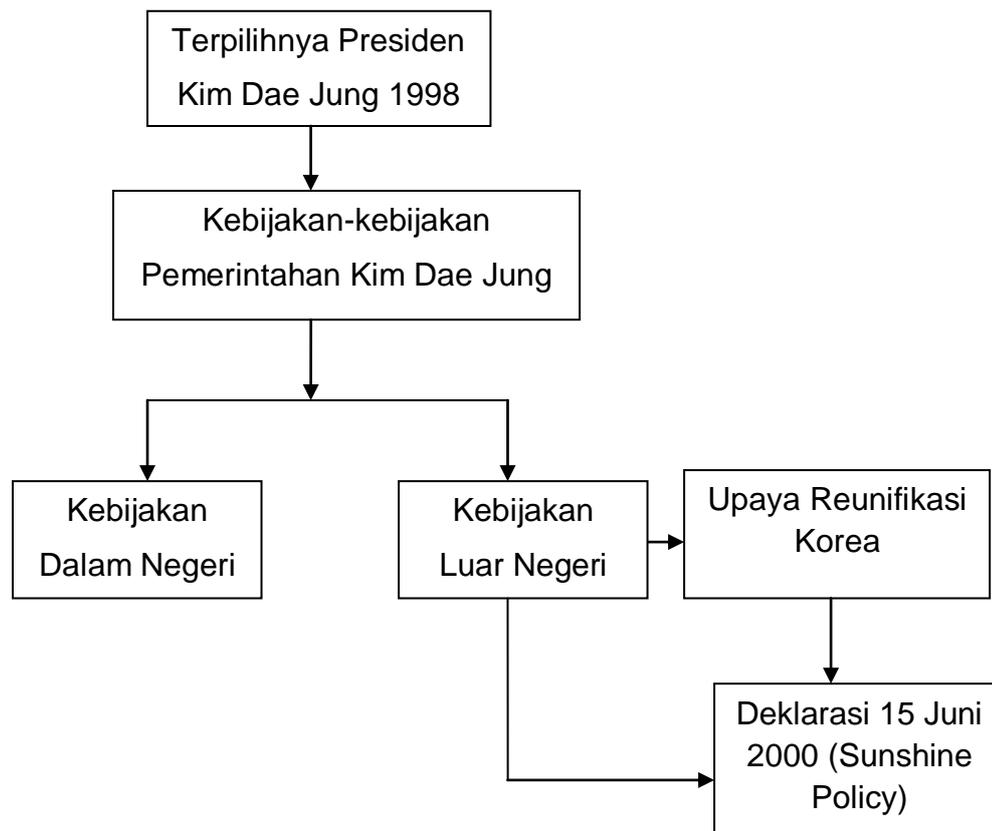
Menurut Nasution (1989), kebijakan adalah arah tindakan yang direncanakan untuk mencapai sesuatu sasaran. Dalam hal ini terdapat tiga masalah. *Pertama*, kebijakan luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Di lain pihak, suatu kebijakan merupakan arah tindakan yang ditujukan pada satu sasaran, maka suatu negara akan mempunyai banyak macam kebijakan karena banyaknya sasaran yang ada padanya. Masalah *kedua*, suatu kebijakan selalu menyangkut keputusan dan tindakan. Tindakan untuk mencapai sasaran dapat dihasilkan dari kebijakan, apabila keputusan itu merupakan hasil dari pemikiran yang membuat kebijakan.

4. Hubungan Internasional

Secara sederhana pengertian Hubungan Internasional dipahami sebagai interaksi yang terjadi antara orang-orang tertentu, di mana interaksi tersebut telah melampaui batas yurisdiksi nasional sebuah negara. Pada dasarnya, tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional, di mana perilaku tersebut bisa berupa perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (Mas'ood, 1994).

Paradigma realis, yang mendominasi teori hubungan internasional selama kurang lebih dua dasawarsa sesudah Perang Dunia II, merupakan wujud dari upaya mengembangkan pendekatan teoritis yang sekaligus bisa mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku dalam hubungan internasional dan bisa memberikan kerangka preskriptif bagi para negarawan dalam membuat keputusan.

Kerangka Berpikir



Berdasarkan uraian pada kerangka teori tersebut, Korea terbagi menjadi dua negara yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Terbaginya Korea menjadi dua negara ini merupakan simbol warisan persaingan ideologi di masa Perang Dingin. Pada akhir tahun 1970-an, Korea Utara dan Korea Selatan mulai tampil di kalangan masyarakat internasional akibat keberhasilannya dalam pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan kemiskinan dalam waktu yang cukup singkat. Selain dari segi ekonomi, Korea menjadi pusat perhatian masyarakat internasional karena pertentangan dan persaingan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang semakin tajam, yakni dengan memperkuat sistem pertahanannya masing-masing.

Presiden Kim Dae Jung memerintah Korea Selatan sejak tahun 1998 hingga 2003. Selama memerintah Korea Selatan, Kim Dae Jung telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk lebih memperbaiki keadaan Korea Selatan. *Pertama*, Presiden Kim Dae Jung mampu mengubah Korea Selatan yang dulunya rezim militer menjadi pemerintahan yang demokratis. *Kedua*, Kim Dae Jung mampu mengeluarkan Korea Selatan dari belenggu krisis moneter dengan menggalakkan pembangunan setelah mendapat bantuan dari IMF. *Ketiga*, Kim Dae Jung berupaya untuk mengadakan reunifikasi Korea dengan mengeluarkan Kebijakan Sinar Matahari

yang nantinya akan membawa Presiden Kim Dae Jung (Korea Selatan) dan Presiden Kim Jong Il (Korea Utara) bertemu dalam meja perundingan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode historis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dengan metode historis adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani *heurishein* yang artinya memperoleh. Dalam pengertian lain, menurut G.J. Reiner yang dikutip oleh Dudung Abdurahman (2011), "heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu" (hlm. 104). Pada tahap ini diusahakan mencari dan menemukan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku yang relevan dan surat kabar. Dalam penelitian ini digunakan sumber data tertulis sekunder berupa surat kabar seperti Kompas terbitan 10 April 2000 "Merayu Si Anak Hilang Korut", Kompas terbitan 11 Juni 2000 "KTT antar Korea (Mimpi Lama yang Kian Nyata)", Kompas terbitan 25 Juni 2000 "Reunifikasi Korea", artikel-artikel dan buku-buku yang relevan dengan penelitian antara lain karya Yang Seung Yoon yang berjudul "Memahami Politik Korea" terbitan tahun 2005, karya Nur Aini Setiawati yang berjudul "Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer" terbitan tahun 2003, dan karya Mohtar Mas'ood yang berjudul "Politik Luar Negeri Korea Selatan Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional" terbitan tahun 2004.

2. Kritik

Kritik yaitu kegiatan untuk menyelidiki apakah sumber-sumber sejarah itu sejati atau otentik dan dapat dipercaya atau tidak. Pada tahap ini kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Menurut Dudung Abdurahman (2011), "kritik ekstern yaitu menguji suatu keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) sedangkan kritik intern menguji keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas)" (hlm. 108).

Kritik ekstern adalah kritik terhadap autentisitas sumber, apakah sumber yang dikehendaki asli atau tidak, utuh atau turunan (salinan). Kritik ekstern dilakukan terhadap sumber yang diperoleh berdasarkan bentuk fisik atau luarnya berupa bahan (kertas atau tinta) yang digunakan dan segi penampilan yang lain. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan antara isi sumber yang satu dengan isi sumber yang lain sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Hal tersebut dilaksanakan

agar dapat mengetahui bagaimana isi sumber sejarah dan relevansinya dengan masalah yang dikaji.

3. Interpretasi

Menurut Nugroho Notosusanto (1978), "interpretasi adalah suatu usaha menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga terbentuk rangkaian yang selaras dan logis" (hlm. 40). Kegiatan menyeleksi dan menafsirkan tulisan buku dalam penelitian ini dilakukan dengan penentuan periodisasi, merangkaikan data secara berkesinambungan. Dalam kegiatan interpretasi ini penelitian yang dilakukan berusaha bersikap obyektif yang disebabkan keanekaragaman data yang diperoleh. Fakta-fakta yang didapat kemudian ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya, sehingga dapat dipahami makna sesuai dengan pemikiran yang relevan, logis dan berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah.

4. Historiografi

Historiografi adalah kegiatan menyusun fakta sejarah menjadi suatu kisah. Menurut Helius Sjamsuddin (1992), "historiografi merupakan kegiatan menyampaikan hasil sintesa fakta-fakta yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah" (hlm. 153). Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah untuk menyampaikan susunan fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah berdasarkan bukti berupa sumber-sumber data sejarah yang dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Kim Dae-jung lahir di Haei-do (Jeolla Selatan), Korea Selatan tanggal 03 Desember 1925 dan meninggal di Seoul, Korea Selatan tanggal 18 Agustus 2009 pada umur 83 tahun. Kim Dae Jung adalah aktivis gerakan pro-demokrasi dan anti-militerisme yang dianggap sebagai penghambat atau penghalang karena potensinya dalam mengancam stabilitas kekuasaan pemerintah yang sangat berkepentingan menjaga status quo sehingga disebut sebagai "musuh negara".

Kim Dae Jung menang dalam pemilu presiden Desember 1997 saat mengalahkan Lee Hoi-chang dari Partai Besar Nasional dan Rhee In-je dari Partai Rakyat Baru. Berakhirnya kekuasaan Presiden Kim Young-sam selintas

menandakan pupusnya dominasi militer yang runtuh akibat krisis moneter. Awal tahun 1998, Kim Dae-jung dilantik sebagai Presiden Korea Selatan. Setelah bantuan IMF (Dana Moneter Internasional) diterima, Kim Dae Jung melancarkan serangkaian pembaruan. Lima *chaebol* terbesar yaitu Hyundai, Samsung, Daewoo, LG, dan Sungkyong menjadi teladan dalam melakukan restrukturisasi dan liberalisasi (Nirmala, 2007).

Sikap Kim Dae Jung yang demokratis tercermin dalam segala tindakannya terutama sewaktu dia memerintah dengan melakukan perombakan politik demokrasi seperti pembebasan para tahanan, adanya kebebasan pers, perlakuan kepada buruh distandarkan dengan perlakuan internasional serta dihapuskannya larangan demonstrasi. Perjuangan dan pengalaman hidupnya yang keras tersebut telah membentuk Kim Dae Jung menjadi figur pemimpin yang keras hati dengan berupaya merealisasikan segala kebijakan yang dikeluarkannya sebagaimana tampak dalam usahanya yang sangat antusias mereunifikasi Korea. Dalam mengeluarkan kebijakannya, Kim Dae Jung juga melakukan serangkaian usaha-usaha yang sangat menguntungkan Korea Selatan, seperti halnya di bidang ekonomi dan keamanan, dimana keputusan mengeluarkan *Sunshine Policy* (Kebijakan Matahari) dilakukan dengan cara yang konsisten mengajak Pyongyang untuk berdamai dengan ketulusan hati, dan dengan kemauan keras untuk mencapai tujuan mengurangi kekhawatiran situasi yang ada (Kompas, 2000).

Sejak dicanangkan kebijakan *engagement* terhadap Korea Utara pemerintah Kim Dae Jung pada tahun 1998 yang disebut sebagai *sunshine policy*, pemerintah Korea Selatan memiliki visi untuk mencapai proses reunifikasi Korea secara damai melalui dialog dan bantuan ekonomi. Visi tersebut didasari oleh keyakinan positif dari pihak Korea Selatan bahwa pemerintah Korea Utara sedang berada dalam proses perubahan untuk menjamin eksistensinya dan dari pihak Korea Selatan percaya bahwa kebijakan *engagement* yang dicanangkan Korea Selatan akan memberikan hasil yang positif (Hendrawan, 2004).

Proses reunifikasi Jerman tahun 1990 lalu mengilhami Presiden Kim Dae Jung untuk mengupayakan agar reunifikasi terjadi di Semenanjung Korea. Kim Dae Jung berupaya mewujudkan penyatuan kembali kedua Korea dalam berbagai forum internasional, seperti saat tampil dalam *APEC Forum on Shared Prosperity and Harmony* di Seoul. Dalam kunjungannya ke Jerman pada bulan Maret 2000, melalui Deklarasi Berlin Kim menyerukan pihak Pyongyang agar mulai mengembangkan

kembali dialog langsung dengan Seoul. Berlin dijadikan tempat yang tepat untuk mengungkapkan Deklarasi Berlin karena Kota Berlin pernah terpecah akibat perbedaan ideologi, tetapi akhirnya bisa bersatu kembali. Deklarasi Berlin diharapkan dapat sebagai acuan menciptakan Semenanjung Korea yang makmur, damai, dan aman di masa mendatang. (Kompas, 2000).

Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung yang memerintah tahun 1998-2003 memiliki itikad baik di dalam setiap pelaksanaan kebijakannya, yang selalu berupaya memprioritaskan pemulihan hubungan bilateral antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kim Dae Jung juga memiliki komitmen jelas terhadap unifikasi bahkan, sejak isu unifikasi masih sangat sensitif di Korea Selatan. Kim Dae Jung mengangkat persoalan penggabungan kembali Korea pertama kali tahun 1971 ketika menentang Park Chung Hee dalam pemilihan presiden. Keinginan untuk mengadakan reunifikasi Korea juga didorong oleh pribadi Kim Dae Jung sendiri. Selain itu, keinginan untuk mengadakan reunifikasi Korea juga didorong oleh pribadi Kim Dae Jung yang konsisten, cinta damai, dan ambisius.

Faktor pendukung adanya reunifikasi juga dikaitkan dengan adanya kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Pengusaha Korea Selatan melihat banyak kesempatan yang dapat digali di Korea Utara, seperti Pantai Timur sebagai pusat industri berat dan kimia, Wansu sebagai tempat pembuatan kapal, daerah Geomdeok terdapat bermacam-macam logam merupakan tempat menjanjikan bagi penanaman investasi industri berat, kimia, dan juga pengembangan sumber daya alam. Begitu juga daerah Najin dan Seonbong merupakan zona ekonomi yang patut dikembangkan sebagai pusat transportasi dan tujuan turis. Sepanjang Pantai Barat, di daerah Haeju terdapat semen dan besi baja, sedangkan daerah Gaesong terdapat bahan makanan dan tenun. Jika fasilitas transportasi di daerah Gaesong diperbaiki, maka hasil-hasil makanan dan tenun dapat dipasarkan di Seoul. Selain itu, masih banyak daerah di Korea Utara yang memiliki potensi sebagai daerah industri (Munthe, 2001). Selain itu, adanya dukungan dari empat negara besar, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Rusia juga menjadi faktor pendukung eksternal reunifikasi Korea.

Dalam upaya reunifikasi Korea terdapat kendala-kendala. Adapun kendalanya, yaitu: perbedaan sistem politik dan ancaman militer Korea Utara. Korea Selatan dan Korea Utara selama perkembangannya mempunyai perbedaan. Perbedaan pertama di bidang pemerintahan, Korea Selatan telah mengalami

beberapa kali perubahan pimpinan sehingga mendapat banyak pengalaman bagaimana menangani krisis politik, sedangkan Korea Utara tidak mengalami perubahan dalam pimpinan karena menganut sistem *The Founding Father*. Kedua di bidang hubungan dengan dunia luar, Korea Selatan yang sudah mendapat pengaruh negara barat, terutama Amerika Serikat telah mengadakan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat internasional sehingga Korea Selatan menjadi negara yang berkembang dan maju, sedangkan Korea Utara dengan politik isolasinya masih tertutup untuk mengadakan hubungan dengan dunia luar sehingga Korea Utara sulit untuk berkembang (Scalapino, Sato, dan Wanandi, 1990).

Kekuatan militer Korea Utara memiliki keunggulan di banding Korea Selatan. Pertama, Korea Utara memiliki keunggulan yang terbukti dari besarnya anggaran pertahanan yang dikeluarkan oleh Korea Utara di banding Korea Selatan. Kedua, Korea Utara memiliki lebih banyak orang bersenjata disbanding jumlah penduduk daripada Korea Selatan dan negara-negara lain di dunia, kecuali Israel ditambah lagi dengan kepemilikan senjata nuklir. Ketiga, Korea Utara memiliki keuntungan geografis. Keempat, Korea Utara memiliki jalur komunikasi yang aman dengan negara sekutunya Rusia dan Cina (Hendrawan, 2004).

Keadaan Korea Utara yang semakin memprihatinkan, membuat Kim Dae Jung berusaha terus membujuk Korea Utara agar mau menerima kebijakannya untuk mencapai reunifikasi. Korea Utara yang masih saja keras dan tidak menanggapi positif usul Kim Dae Jung tidak mematahkan keinginan Kim Dae Jung untuk tetap merangkul Korea Utara. Kebijakan Kim Dae Jung tersebut diberi nama "Kebijakan Sinar Matahari". Disebut Sinar Matahari karena selalu menghangatkan dan memberi rasa nyaman bagi penduduk di muka bumi, dengan maksud bahwa kebijakan Kim Dae Jung akan membawa perubahan yang lebih baik untuk Korea Utara tanpa harus melalui jalan kekerasan.

Strategi Kebijakan Matahari Kim Dae Jung berupaya menempa hubungan yang lebih baik antar kedua Korea dengan memisahkan ekonomi dan politik serta mengizinkan perusahaan-perusahaan perorangan di Korea Selatan untuk menanamkan modalnya di Korea Utara dan mempromosikan proyek-proyek yang didasarkan atas prinsip timbal balik. Kesempatan untuk membantu Korea Utara tidak disia-siakan pemerintah Korea Selatan. Dalam membantu pertumbuhan ekonomi Korea Utara, Korea Selatan mengadakan kerjasama ekonomi dengan Korea Utara sebesar 4,13 juta dollar Amerika untuk membantu Korea Utara melalui organisasi

internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pertengahan tahun 2000 (Kompas, 2000).

Pemerintah Kim Dae Jung mengizinkan pelaku bisnis di Korea Selatan untuk bekerjasama dengan Korea Utara dalam bidang produksi. Kerjasama ekonomi dilakukan agar produktivitas dan efisiensi kerjasama ekonomi antar Korea dapat meningkat. Bantuan ekonomi termasuk bantuan makanan dan pupuk, merestrukturisasi sector pertanian Korea Utara, mengkonstrukturisasi kembali infrastruktur, menyelesaikan masalah listrik, mendukung investasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan swasta Korea Selatan serta memberi jaminan investasi bagi pelaku bisnis Korea Selatan, menghindari pajak yang terlalu tinggi, dan menghindari perselisihan ekonomi (Nirmala, 2007). Kebijakan Matahari merupakan paket yang digunakan Kim Dae Jung untuk mencapai keinginannya menuju reunifikasi Korea. Kim Dae Jung telah membantu Korea Utara untuk lebih terbuka dan bergabung dengan komunitas internasional. Kim Dae Jung yakin dengan Kebijakan Matahari dapat mengurangi situasi perang dingin di Semenanjung Korea.

Korea Utara merupakan negara yang tertutup dari dunia luar. Korea Utara tetap mencari jalan sendiri dengan menggunakan ideologi *Ju-che*. Negara dan masyarakat Korea Utara dikenal oleh dunia luar sebagai tanah yang membeku. Presiden Kim Dae Jung tidak henti-hentinya mencoba "menyinari" Korea Utara dengan Kebijakan Matahari. Usaha Kim Dae Jung mulai membuahkan hasil yang dibuktikan dengan dibukanya pintu air oleh ketua umum *Hyundai Group*, Chung Ju-Yong. Chung membawa bantuan berupa 500 ekor sapi melewati jalan darat antara Korea Utara dan Korea Selatan yang selama ini tertutup rapat.

Chung Ju-Young bertemu dengan sejumlah pemimpin Korea Utara, termasuk Kim Jong Il. Chun dapat mengetahui bahwa para pemimpin Korea Utara sangat menginginkan kerjasama dalam berbagai bidang dengan pihak Korea Selatan karena Korea Utara sudah lama menghadapi kesulitan besar, seperti kekurangan pangan, kekurangan valuta asing, kekurangan minyak mentah, dan kekurangan energi. Kim Dae Jung memberikan ijin kepada sejumlah banyak pengusaha Korea Selatan untuk mencari kesempatan dalam membuka dan melakukan kerjasama dengan rekannya di Korea Utara. Meskipun jumlahnya belum terlalu banyak, sejak saat itu sudah mulai terdapat hubungan dalam berbagai bidang non politik. Keberhasilan ini menjadi tanda keberhasilan pelaksanaan Kebijakan

Sinar Matahari yang dipelopori oleh Presiden Kim Dae Jung (Mas'ood dan Yoon, 2005).

Melalui Kebijakan Sinar Matahari, Kim Dae Jung memelopori upaya rekonsiliasi antara Korea Selatan dengan saudaranya, Korea Utara yang tetap bermusuhan setelah Perang Korea 1950-1953 dengan mengadakan kunjungan ke Pyongyang. Pertemuan puncak antara Presiden Kim Dae Jung dan Kim Jong Il tahun 2000 di Pyongyang mengandung arti penting bagi upaya reunifikasi Korea. Melalui pertemuan puncak itu, kedua Korea memilih cara penyatuan dengan hidup bersama secara damai. Berdasarkan arti pertemuan puncak, kedua Korea sangat memerlukan sikap untuk menuju masa pasca Perang Dingin dan menghapuskan hubungan pertentangan di masa Perang Dingin. Kunjungan Kim Dae Jung ke Korea Utara dan berhasilnya pertemuan puncak di Pyongyang pada Juni 2000 merupakan hasil Kebijakan Sinar Matahari Kim Dae Jung. Oleh karena keberhasilannya, Kim Dae Jung memperoleh hadiah Nobel Perdamaian (Yoon dan Mas'ood, 2004).

Dampak adanya Kebijakan Sinar Matahari antara lain, adanya proyek mempertemukan keluarga yang terpisah, kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang pertahanan, dan kerjasama di bidang sosial budaya. Proyek mempertemukan keluarga terpisah antara Korea Selatan dan Korea Utara termasuk dalam lima pasal yang disepakati oleh Kim Dae Jung dan Kim Jong Il. Pertemuan keluarga yang terpisah berlangsung di Seoul dan Pyongyang pada tanggal 15 Agustus 2000. Keluarga yang terpisah di Semenanjung Korea pada umumnya diakibatkan oleh Perang Korea tahun 1950-1953. Proyek mempertemukan keluarga terpisah adalah hal yang terpenting dan harus diutamakan oleh kedua pemerintah di Semenanjung Korea. Sejak pertemuan puncak tanggal 13-15 Juni 2000, sering diselenggarakan pertemuan antar palang merah, di antaranya dua kali mempertemukan keluarga terpisah, mendirikan kantor, dan mewujudkan sistem surat menyurat antar Korea supaya mereka yang mencari keluarganya dapat secara bebas menulis surat kepada keluarganya (Munthe, 2001).

Politik Sinar Matahari merupakan kebijakan politik luar negeri yang dibuat oleh Presiden Kim Dae Jung guna meningkatkan hubungan dalam rangka mencapai sebuah rekonsiliasi dengan Korea Utara, diantaranya pertukaran tenaga kerja maupun barang dari Korea Utara dan Korea Selatan. Kerjasama ekonomi antar Korea memang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Modal dan teknologi dari pihak Korea Selatan serta sumber-sumber alam dan tenaga kerja

yang bermutu dari Korea Utara saling dapat mengisi. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri Korea Selatan memberikan motivasi bagi perusahaan dan tenaga kerja Korea Selatan untuk memperluas gerak kerjanya ke luar negeri. Pengusaha-pengusaha Korea Selatan menaruh perhatian untuk dapat menanamkan modal di Korea Utara. Para pengusaha Korea Selatan beranggapan bahwa di Korea Utara banyak tempat yang dapat digunakan sebagai lahan bisnis, seperti tekstil dan alat-alat elektronik (Yoon dan Setiawati, 2003).

Hasil nyata dalam pertemuan puncak antar Korea adalah pertemuan Menteri Pertahanan kedua negara. Pertemuan kedua Menteri Pertahanan dalam menuju arah normalisasi hubungan Korea Selatan dan Korea Utara merupakan kemajuan yang sangat diharapkan oleh semua penduduk Korea dan masyarakat internasional. Sebelum pertemuan puncak antar Korea diselenggarakan di Pyongyang, tahun 1998-1999 terjadi pertempuran laut yang keras antara angkatan laut Korea Selatan dan Korea Utara dengan intensitas yang tinggi. Pasca Konferensi Tingkat Tinggi Korea, tahun 2000-2001 pertempuran angkatan laut Korea Selatan dan Korea Utara hampir tidak pernah terjadi.

Berdasarkan deklarasi antar Korea yang disepakati kedua kepala pemerintahan, para Menteri Pertahanan mencoba memperlihatkan usaha untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan saling kepercayaan. Kedua pihak pertahanan akan memasang telepon langsung dalam waktu dekat dengan maksud kedua belah pihak akan saling menyampaikan pemberitahuan apabila akan mengadakan latihan militer. Kedua menteri pertahanan sepakat bekerjasama dalam mewujudkan proyek menghubungkan rel kereta api. Pembangunan rel kereta api membutuhkan bantuan pemimpin pertahanan sebab proyek akan dilaksanakan di dalam daerah bebas militer yang banyak terdapat fasilitas pertahanan dan ranjau darat (Mas'ood dan Yoon, 2005).

Program-program bersama yang dijalankan Korea Utara dan Korea Selatan sebelum dan pasca terlaksananya Konferensi Tingkat Tinggi Korea dalam berbagai bidang merupakan suatu hasrat yang mendalam untuk membuka jalan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Korea yang masih terpecah hingga saat ini. Bahkan hingga menyentuh bidang olahraga, seperti pembangunan infrastruktur olahraga yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara maupun pelaksanaan even olahraga itu sendiri antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Pada tanggal 29 September 1999 di daerah Sungai Potonggang, kota Pyongyang dilakukan

peletakan batu pertama pembangunan gedung olahraga Pyongyang oleh *Hyundai Business Group* dan disponsori oleh Ketua Kehormatan *Hyundai Group* Jong Ju-yong.

Pertukaran dan kerjasama bidang olahraga antar Korea diharapkan memberi pengaruh yang cukup besar pada bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Tidak hanya pertandingan persahabatan itu saja yang dilaksanakan untuk mencapai reunifikasi, tetapi juga terlihat ketika Olimpiade di Sydney tahun 2000. Rombongan olahraga Korea Utara dan Korea Selatan masuk bersama dalam upacara pembukaan Olimpiade Sydney dengan didahului satu bendera rakyat, yaitu bendera peta Semenanjung Korea. Keberhasilan bidang olahraga di Sydney diharapkan dapat membantu disepakatinya pembentukan tim olahraga tunggal dalam pertandingan-pertandingan internasional. Namun, hal itu tidak berhasil mewujudkan pembentukan tim tunggal dalam pertandingan Piala Dunia 2002 di Korea. Dalam kejuaraan sepak bola internasional yang terbesar itu, hanya tim nasional Korea Selatan saja yang maju bertanding (Mas'ood dan Yoon, 2005).

Simpulan

Presiden Kim Dae Jung memerintah Korea Selatan selama lima tahun, dari tahun 1998 sampai tahun 2003. Kim Dae-jung lahir di Haei-do (Jeolla Selatan), Korea Selatan tanggal 03 Desember 1925 dan meninggal di Seoul, Korea Selatan tanggal 18 Agustus 2009 pada umur 83 tahun. Awal tahun 1998, Kim Dae-jung dilantik sebagai Presiden Korea Selatan. selama lima tahun memerintah, Kim Dae Jung berhasil membawa Korea Selatan dari rezim militer menuju pemerintahan yang demokratis. Prestasi besar lain yang diukir Kim Dae Jung adalah memperkenalkan "Kebijakan Matahari Bersinar" (*Sunshine Policy*). Kim Dae Jung berharap dengan adanya Kebijakan Sinar Matahari dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk keadaan di Semenanjung Korea. Meskipun, Kim Dae Jung mengetahui bahwa kebijakannya itu tidak dapat direalisasikan secepat mungkin.

Proses reunifikasi Jerman tahun 1990 lalu mengilhami Presiden Kim Dae Jung untuk mengupayakan agar reunifikasi terjadi di Semenanjung Korea. Selain itu, keinginan untuk mengadakan reunifikasi Korea juga didorong oleh pribadi Kim Dae Jung sendiri. Kim Dae Jung merupakan pribadi yang konsisten, dibuktikan dengan keinginannya untuk merealisasikan kesepakatan dan perjanjian yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulunya dalam rangka program reunifikasi Korea. Kim

Dae Jung juga merupakan sosok yang cinta damai. Kim Dae Jung berusaha menyatukan Korea dengan menghindari perang dan benar-benar menjunjung perdamaian. Selain itu, Kim Dae Jung adalah orang yang berambisi. Sebelum menjadi presiden, Kim Dae Jung sudah mempunyai ambisi untuk menyatukan Korea. Setelah dilantik menjadi presiden, Kim Dae Jung berusaha merealisasikan keinginannya tersebut dengan mengeluarkan Kebijakan Sinar Matahari. Latar belakang reunifikasi yang lain adalah adanya dukungan dari empat negara besar, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Rusia. Namun, dalam upaya reunifikasi terdapat kendala, yaitu sistem politik Korea Utara yang masih menganut sistem *The Founding Father* dan ancaman nuklir Korea Utara yang dapat mengganggu keamanan Korea Selatan.

Melalui Kebijakan Sinar Matahari, Kim Dae Jung memelopori upaya rekonsiliasi antara Korea Selatan dengan saudaranya, Korea Utara yang tetap bermusuhan setelah Perang Korea 1950-1953 dengan mengadakan kunjungan ke Pyongyang. Kunjungan Kim Dae Jung ke Korea Utara dan berhasilnya pertemuan puncak di Pyongyang pada Juni 2000 merupakan hasil Kebijakan Sinar Matahari Kim Dae Jung. Oleh karena keberhasilannya, Kim Dae Jung memperoleh hadiah Nobel Perdamaian. Kebijakan Sinar Matahari memberikan dampak yang berarti bagi kedua Korea, yaitu pertemuan keluarga yang terpisah dan adanya kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya.

Saran

Bagi para mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai masalah yang terjadi di kawasan Asia Timur, terutama tentang perselisihan di Semenanjung Korea. Perang Korea yang terjadi tahun 1950-1953 mengakibatkan Korea Selatan dan Korea Utara yang dulunya merupakan satu bangsa yang utuh menjadi terpecah sehingga rakyat mengalami banyak penderitaan, salah satunya adalah terpisah dengan keluarga. Melalui penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat mempelajari betapa pentingnya perdamaian dan persatuan yang tercipta di suatu bangsa sehingga dapat menjaga dan mempertahankan kesatuan bangsanya supaya rakyat dapat hidup rukun, damai dan sejahtera. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai para tokoh yang membawa perubahan bagi bangsanya maupun dunia,

seperti Kim Dae Jung dan Kim Jong Il yang merupakan tokoh pembaharuan dalam perkembangan dunia mutakhir.

Bagi para peneliti, diharapkan ada yang tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai upaya penyatuan Korea, karena hingga saat ini antar kedua Korea ini masih belum dapat menemukan jalan yang baik untuk kembali bersatu menjadi satu bangsa yang utuh. Pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Kim Dae Jung di Korea Selatan, cita-cita Kim Dae Jung melalui Kebijakan Sinar Matahari memang masih dilanjutkan oleh penggantinya, tetapi tidak menampakkan hasil yang baik seperti ketika Kim Dae Jung masih memerintah. Bahkan, mulai ramai kembali dengan munculnya isu-isu Korea Utara yang meningkatkan jumlah dan kekuatan nuklirnya sehingga dapat mengancam Korea Selatan. Selain itu, bentuk pemerintahan Korea Utara yang masih menggunakan sistem *The Founding Father* hingga sekarang menjadi salah satu faktor penghambat penyatuan Korea. Fenomena tersebut menarik untuk menjadi bahan kajian para peneliti terutama yang menekuni bidang hubungan internasional dan sejarah dunia mutakhir guna memperoleh fakta yang terjadi tentang perkembangan negara di dunia.

Daftar Pustaka

Buku

Dahlan, Nasution. (1989). *Ilmu Hubungan Internasional Teori Dan Sistem*. Jakarta: Rajawali

Dudung, Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wahana Ilmu

Elly M. Setiadi, Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana

Helius, Syamsudin. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Hendrawan, F. R. (2004). *Sikap Jepang terhadap Rencana Reunifikasi Korea*. Yogyakarta: UMY

Mas'ood, M., (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Mas'ood, M dan Yoon, Y. S. (2005). *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta: UGM Press

- Munthe, E. R. (2001). *Politik Luar Negeri Korea Selatan Era Presiden Kim Dae Jung*. Yogyakarta: UPN
- Nirmala, D. A. (2007). *Peran Pemerintah dalam Politik Perekonomian Korea Selatan (Studi Kasus Chaebol)*. Yogyakarta: UMY
- Scalapino, Sato, dan Wanandi. (1990). *Masalah Keamanan Asia*. Jakarta: CSIS
- Susanto. N. S. (1978). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Walter. Jones. S. (1993). *Logika Hubungan Internasional, Kekuasaan Ekonomi Politik Internasional Dan Tataan Dunia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Yoon, Y. S., dan Setiawati, N. A. (2003). *Sejarah Korea Sejak Awal Abad hingga Masa Kontemporer*. Yogyakarta: UGM Press
- Yoon, Y. S., dan Mas'ood, M. (2004). *Politik Luar Negeri Korea Selatan Penyesuaian Diri terhadap Masyarakat Internasional*. Yogyakarta: UGM Press

Surat Kabar

- KOMPAS*. (2000, 10 April). Merayu "Si Anak Hilang Korut", hal. 3
- KOMPAS*. (2000, 16 April). Hasil Pemilu mengecewakan Kim, hal. 3
- KOMPAS*. (2000, 19 Juni). Korut Desak Korsel Berunding Lagi, hal. 3